

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagai pelaksana kewenangan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Besar harapan kami, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja apratur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 27 Januari 2021
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Denpasar

Ir. Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640913 199303 1 006

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|---|----|
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 | Latar Belakang | 1 |
| 1.2 | Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJiP | 2 |
| 1.3 | Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi | 2 |
| 1.4 | Kondisi dan Tantangan Pembangunan | 8 |
| 1.5 | Strategi dan Kebijakan | 10 |
| 1.6 | Program dan Kegiatan | 21 |
| 1.7 | Realisasi Program dan Kegiatan..... | 22 |
| BAB II | PERJANJIAN KINERJA | 24 |
| 2.1 | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) | 24 |
| 2.2 | Perjanjian Kinerja | 27 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | 28 |
| 3.1 | Pengukuran Kinerja Organisasi | 28 |
| 3.2 | Realisasi Anggaran | 36 |
| 3.3 | Permasalahan dan Solusi..... | 39 |
| BAB IV | INOVASI DPUPR YANG MASUK DALAM IGA (Inovation Government Award)..... | 40 |
| 4.1 | TAKSU BLI RAI (Tata Kualitas Sungai Untuk Bersih, Lestari, Ramah dan Indah) | 40 |
| 4.2 | RAJAKOL (Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi Online)..... | 41 |
| 4.3 | SIJALAK (Sistem Informasi jalan Kota Denpasar)..... | 41 |
| 4.4 | SIDASI (Sistem Informasi Drainase dan Irigasi Kota Denpasar)..... | 42 |
| BAB V | PENUTUP | 43 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-----------|--|
| Tabel 1.1 | Jumlah ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar |
| Tabel 1.2 | Jumlah ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Bidang Pendidikan/Jurusan |
| Tabel 1.3 | Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dengan Program dan Kegiatan DPUPR Tahun 2020 |
| Tabel 2.1 | Keterkaitan Program, Indikator Program (Outcome), Kegiatan, Indikator dengan Tujuan PD dan Sasaran PD |
| Tabel 3.1 | Pengukuran Kinerja T.A. 2020 |
| Tabel 3.2 | Pengukuran Kinerja T.A. 2019 |
| Tabel 3.3 | Target dan Realisasi Program dan Kegiatan DPUPR T.A. 2020 |
| Tabel 3.4 | Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib DPUPR T.A. 2020 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Bidang Fisik dalam rangka mengelola dan mengembangkan sarana dan prasarana dasar ke PUPR-an memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan dan mendukung pertumbuhan pembangunan diberbagai sektor di era persaingan Global ini. Denpasar sebagai Kota Besar, pusat berbagai aktivitas Perkantoran, Pendidikan, Perdagangan dan Jasa lainnya sebagai salah satu destinasi wisata, akan mengalami dampak permasalahan serta perubahan yang sangat cepat dan semakin kompleks. Hal ini akan menentukan kebijakan program kegiatan bidang ke PUPR an pada masa yang akan datang. Oleh karena itu dituntut pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik agar diselenggarakan secara efektif dan efisien sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyebaran pembangunan secara merata seimbang, berdaya saing dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan unit dinas teknis yang melaksanakan urusan kewenangan wajib pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dalam kewenangannya melaksanakan tugas- tugas teknis sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas- tugas ke PUPR-an tersebut tentu diperlukan suatu pengelolaan unit organisasi yang mempunyai kompetensi, responsive dan dinamis terhadap perkembangan informasi dan tehnologi serta tuntutan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pembangunan di bidang Infrastruktur seperti Sanitasi Lingkungan Permukiman, Jalan, Trotoar, Drainase dan Irigasi dengan kualitas yang masih perlu ditingkatkan, sehingga kualitas yang dihasilkan memiliki umur ekonomis yang lebih lama, memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna serta dapat memberikan manfaat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Guna mengendalikan pemanfaatan ruang, maka DPUPR melalui Bidang Tata Ruang bertugas untuk menjaga kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif, terkendali dan berkelanjutan sehingga tercipta keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan, terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsi kota baik oleh pemerintah maupun masyarakat/sektor swasta. Agar dapat tercapainya pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang Kota diperlukan komitmen kuat dari ASN dan seluruh stake holder, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan ruang sesuai RTRW dan RDTR Kota.

Adapun arah kebijakan Walikota Denpasar adalah Mewujudkan Denpasar Sebagai Kota Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan, sehingga program Pembangunan di Bidang Sarana dan Prasarana ke PUPR – an dilandasi

pada aspek budaya dan kearifan lokal (*Local Genius*) dalam rangka mendukung terciptanya konsep pembangunan perkotaan berwawasan budaya.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan LKjIP ini mengacu Peraturan Men-Pan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riview atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan dan perundang-undangan yang terkait.

Sebagai dasar penyusunan LKjIP yang merupakan dokumen yang menggambarkan keberhasilan PD mencapai indikator kinerja outcome / dampak atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan PD adalah RPJMD Kota Denpasar 2016-2021 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). RKT dan PK merupakan acuan yang digunakan untuk pertanggungjawaban janji pencapaian tingkat kinerja outcome yang harus dicapai PD.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP

Penyusunan LKjIP oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dimaksudkan sebagai bentuk laporan capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan serta sebagai alat kendali perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pemerintahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang lebih berdaya guna, berhasil guna, efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana ketentuan yang berlaku, sebagai media pengkomunikasian pencapaian tujuan dan sasaran PD, serta pertanggung jawaban dan pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik/stakeholder. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja PD sebagai salah satu persyaratan dalam upaya tercapainya pemerintahan yang baik/*good governance*.

1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah salah satu Perangkat Daerah Kota Denpasar yang membantu tugas Walikota Denpasar melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Kota Denpasar, khususnya bidang infrastruktur/ Fasilitas Wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah yaitu pada Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Tata Ruang,

Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Infrastruktur ke PU-an.

Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas urusan wajib pelayanan dasar, dengan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar No.15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Denpasar No.7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar. Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar ditetapkan dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Melaksanakan tugas membantu Walikota Denpasar dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah pada urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman, Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program, Bidang Penataan Ruang serta Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana;
- c. Menyusun pola, program, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ketersediaan dan pelestarian sumber daya air;

- d. Melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kelancaran konektivitas;
- e. Melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga kualitas;
- f. Melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk penyediaan sarana dan prasana jalan dan jembatan yang mantap;
- g. Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai acuan penetapan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- h. Menyelenggarakan infrastruktur pada kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menata kawasan permukiman;
- i. Menyelenggarakan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ketersediaan bangunan gedung;
- j. Mengelola dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung dengan sungai sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga fungsi;
- k. Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memenuhi standar kelayakan;
- l. Mengelola dan mengembangkan SPAM sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk penyediaan air minum layak;
- m. Mengembangkan sistem dan mengelola persampahan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk efektivitas pengelolaan persampahan;
- n. Mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk efektivitas dan pencegahan pencemaran lingkungan;
- o. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing;
- p. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan informasi;
- q. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi, mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman kompetensi kualitas dan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi;

- r. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam upaya menjaga dan meningkatkan kepatuhan;
- s. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di Kota Denpasar dan Asosiasi Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam upaya membangun sinergitas dan integritas;
- t. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa serta produk konstruksi dalam negeri sesuai ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan daya saing;
- u. Melaksanakan pemberian rekomendasi Teknis penelitian bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai dasar pemberian perizinan;
- v. Mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Kota Denpasar berdasarkan potensi untuk kemajuan di bidang konstruksi;
- w. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pengaturan Penataan Ruang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- x. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Kawasan Strategis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- y. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan pemanfaatan ruang serta kawasan strategis sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang akuntabel;
- z. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan pembinaan penataan ruang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
- aa. Menyiapkan bahan kerjasama penataan ruang antar Kabupaten/Kota dan memfasilitasi kerjasama penataan ruang sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan sinkronisasi;
- bb. Melaksanakan administrasi Dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan akuntabilitas;
- cc. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- dd. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

- ee. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- ff. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan Bidang-Bidang. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub.Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub.Bagian, Seksi masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi. Jumlah ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah sebanyak 140 orang dan dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar

| NO | PENDIDIKAN | | JENIS KELAMIN | | JABATAN | JUMLAH (Orang) |
|----|------------|----|---------------|-----------|-------------------|----------------|
| | S2 | S1 | LAKI | PEREMPUAN | | |
| 1 | S2 | | √ | | Kepala Dinas PUPR | 1 |
| 2 | | S1 | √ | | Sekrearis | 1 |
| 3 | S2 | | √ | | Ka.Bid | 4 |
| 4 | | S1 | | √ | Ka.Bid | 2 |
| 5 | S2 | | √ | | Ka.Si | 2 |
| 6 | S2 | | | √ | Ka.Si | 3 |
| 7 | | S1 | √ | | Ka.Si | 7 |
| 8 | | S1 | | √ | Ka.Si | 6 |
| 9 | | S1 | √ | | Ka.Su.Bag | 1 |
| 10 | | S1 | | √ | Ka.Su.Bag | 2 |
| 11 | | S1 | √ | | Staf | 13 |
| 12 | | S1 | | √ | Staf | 12 |
| 13 | | D3 | √ | | Staf | 1 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|---|---|--------|-----|
| 14 | | SMA | √ | | Staf | 38 |
| 15 | | SMA | | √ | Staf | 15 |
| 16 | | SMP | √ | | Staf | 21 |
| 17 | | SD | | | Staf | 11 |
| | | | | | Jumlah | 140 |

Sedangkan jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan pendidikan/jurusannya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah ASN Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Denpasar Berdasarkan Bidang Pendidikan / Jurusan

| No | Bidang Pendidikan / Jurusan | Jumlah (Orang) |
|----|-----------------------------|----------------|
| 1 | S1 Teknik Sipil | 16 |
| 2 | S2 Teknik Sipil | 3 |
| 3 | S1 Arsitektur | 3 |
| 4 | S2 Arsitektur | 3 |
| 5 | SMK / STM | |
| | a. Bangunan | 2 |
| | b. Listrik | 1 |
| | c. Mesin | 4 |
| 6 | Lain-Lain | 108 |
| | Jumlah | 140 |

Adapun rincian Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub.Bagian Umum
 - b. Sub.Bagian Kepegawaian
 - c. Sub.Bagian Keuangan
3. Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Program

- b. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi
 - c. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
4. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
 - b. Seksi Pelaksanaan
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 5. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
 6. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman
 7. Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
 - c. Seksi Penataan Bangunan
 8. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang
 - c. Seksi Penataan Bangunan

1.4 Kondisi dan Tantangan Pembangunan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar melaksanakan tugas-tugas strategis mengingat tugas pokok adalah melaksanakan program dan kegiatan infrastruktur/Fasilitas Wilayah yang merupakan pendukung sekaligus pendorong peningkatan daya saing daerah, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pendidikan. Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Propinsi Bali yang telah bertumbuh menjadi kota besar dengan penduduk mencapai 947.100 jiwa dengan beragam aktivitas yang membutuhkan kecepatan mobilitas dan penyediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas. Disisi lain Kota Denpasar juga merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, perekonomian dan jasa lainnya dan terletak pada lintasan pergerakan penduduk antar kabupaten yaitu di sebelah selatan, utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Badung yaitu Kecamatan Kuta dan Selat Badung, Kecamatan Mengwi dan Abiansemal serta di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar.

Sebagaimana kondisi yang disampaikan diatas dan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Kota Denpasar, mendukung kebijakan dan pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan, serta mewujudkan Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dituntut untuk mampu meningkatkan kinerja di bidang infrastruktur khususnya Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Tata Ruang, Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan perencanaan yang terukur, comprehensive, akuntabel dan transparan, serta meningkatkan daya saing pekerja dan badan usaha jasa konstruksi.

Kondisi dan ketersediaan infrastruktur ke PU-an di Kota Denpasar sudah cukup memadai dan berkualitas baik, namun demikian masih dibutuhkan pemerataan serta peningkatan kualitas dan kuantitas baik melalui pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan infrastruktur yang sudah terbangun.

Dalam upaya mencapai kualitas infrastruktur yang andal maka diperlukan ketersediaan dan kemampuan jasa konstruksi yang berkualitas dan berkelanjutan dimana Pemerintah Kota Denpasar berperan dalam upaya mewujudkan struktur usaha/pelaku konstruksi yang kokoh, andal dan berdaya saing yaitu melalui fasilitasi dan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi ; peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Kota Denpasar, penerbitan Rekomendasi Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar, serta tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Tantangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas-tugas strategis di bidang infrastruktur/fasilitas Wilayah ada pada lingkungan internal (weaknesses) dan external (threat). Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai kebutuhan, terbatasnya anggaran, kemampuan melakukan koordinasi dengan stakeholder, kurangnya ketersediaan data base infrastruktur, kemampuan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja PD merupakan tantangan permasalahan internal yang harus disikapi agar menjadi kekuatan untuk meningkatkan kinerja pembangunan bidang infrastruktur.

Kurangnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengendalian, pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, peraturan pemerintah yang sering berubah dan tumpang tindih antar peraturan/perundangan merupakan tantangan permasalahan eksternal yang harus disikapi guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan adalah dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan lingkungan internal, instansi terkait dan para stakeholder, mengoptimalkan SDM yang ada dengan meningkatkan

kualitas dan kapabilitas SDM aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatkan efisiensi waktu, dan biaya serta meningkatkan kualitas, kuantitas dan efektifitas sarana dan prasarana kerja.

1.5 Strategi dan Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar, maka ditetapkan visi Kota Denpasar yaitu ” **Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan**”. Guna mewujudkan visi dimaksud maka ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*.

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Denpasar tertuang dalam RPJMD Kota Denpasar pada Tabel 5.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam kolom Indikator Sasaran, yaitu:

1. Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha)
2. Indeks Tri Hita Karana
3. Indeks Pembangunan Kebudayaan
4. Angka kemiskinan (%)
5. Angka Pengangguran (%)
6. Angka Harapan Hidup (Tahun)
7. Indeks Pendidikan
8. Indek Pembangunan Gender/IPG
9. Indek Pemberdayaan Gender/IDG
10. Kategori Kota Layak Anak
11. Luas Permukaan Kumuh (%)
12. Jalan Kondisi Baik (%)
13. Titik Genangan (%)
14. Rumah Tangga terakses system jaringan sanitasi (%)
15. Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%)
16. Indeks Kepuasan Masyarakat

17. Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori)
18. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kategori)
19. Pertumbuhan sector industri pengolahan dalam PDRB (%)
20. Pertumbuhan sector perdagangan dalam PDRB (%)
21. Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%)
22. Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%)
23. Koperasi yang SHU-nya meningkat
24. Investasi yang tercatat di PTSP
25. Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)
26. Lama Tinggal Wisatawan
 - Asing
 - Domestik
27. Jumlah Penerimaan Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah)
28. Sampah tereduksi (%)
29. Indek LH

Dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Kota Denpasar yang telah ditetapkan, maka misi sebagaimana dimaksud di atas dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) tujuan jangka menengah dan 9 (sembilan) Sasaran Jangka Menengah PD.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah :

1. Meningkatkan keandalan infrastruktur jalan.
2. Meningkatkan keandalan pengelolaan sumber daya air.
3. Meningkatkan akses air minum layak.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan akses Sanitasi Layak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatnya pengurangan titik genangan.
6. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah kota.
7. Meningkatkan penyelenggaraan tertib administrasi dan teknis bangunan untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya.
8. Meningkatkan kualitas Jasa Konstruksi
9. Meningkatkan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Untuk tercapainya tujuan jangka menengah, maka ditetapkan 9 (sembilan) Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar sebagaimana dibawah ini :

1. Meningkatnya ketersediaan konektivitas wilayah dan kualitas layanan jalan Kota.

2. Meningkatnya Ketersediaan Air yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatnya Kualitas Layanan Air minum permukiman perkotaan.
4. Meningkatnya kualitas sanitasi permukiman perkotaan.
5. Meningkatnya daerah bebas banjir atau genangan.
6. Meningkatkan tertib pemanfaatan ruang Kota Denpasar.
7. Meningkatkan ketersediaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kelayakan bangunan gedung.
8. Meningkatnya pelaksanaan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi di Kota Denpasar.
9. Meningkatnya kualitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran serta untuk mewujudkan tingkat, kondisi ketersediaan, kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, serta untuk mendukung terciptanya kehidupan yang aman, produktif dan berkelanjutan sehingga terwujudnya keadaan masyarakat yang semakin sejahtera dan berdaya saing maka ditetapkan 12 (dua belas) Strategi dan 12 (dua belas) Arah Kebijakan PD.

Strategi yang ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar adalah :

1. Meningkatkan mutu perkerasan jalan
2. Meningkatkan pembangunan jalan pada daerah pembangunan/ pengembangan baru
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan
4. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan dan air tanah
5. Meningkatkan jaringan layanan air minum yang aman
6. Meningkatkan ketersediaan dan layanan akses pengelolaan air limbah terpusat serta sarana dan prasarana system sanitasi setempat (on site) dan skala kota
7. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana air limbah komunal dalam skema Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
8. Meningkatkan kualitas dan kapasitas saluran drainase dan irigasi secara terpadu pada 5 sistem yang telah terbangun
9. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Denpasar
10. Meningkatkan kehandalan bangunan dan gedung
11. Meningkatkan pembinaan dan kompetensi tenaga kerja dan badan usaha Jasa Konstruksi
12. Meningkatkan Kinerja Aparatur yang Akuntabel

Sedangkan Arah Kebijakannya adalah:

1. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi diarahkan untuk mendukung pembangunan kota
2. Meningkatkan kualitas dan mengendalikan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan sesuai budaya setempat
3. Mengendalikan jaringan drainase kota yang terintegrasi untuk menanggulangi banjir
4. Mengembangkan pengelolaan persampahan dan air limbah secara profesional dan terintegrasi
5. Mengembangkan penyediaan air bersih dan jaringannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
6. Mengembangkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan dan tetap menjaga ketersediaan dan kualitas sumber daya air dalam menunjang keseimbangan lingkungan hidup dalam kerangka Sarbagita
7. Mengembangkan dan tetap menjaga ekosistem sungai
8. Mengembangkan pengelolaan sistem jaringan irigasi dalam upaya pembangunan bidang pengairan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan
9. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya sesuai pola ruang dan fungsi ruang di Kota Denpasar
10. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota Denpasar, termasuk pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
11. Mengembangkan pola peningkatan kualitas, daya saing dan kompetensi tenaga kerja dan badan usaha jasa konstruksi melalui pembinaan dan sertifikasi keterampilan
12. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR pada tahun 2020 ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) indikator yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas layanan jalan Kota Denpasar
2. Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan
4. Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan
5. Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung pemerintah Kota

6. Meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang
7. Meningkatnya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh Badan Usaha Jasa Kontruksi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar mengacu pada Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Denpasar. Keterkaitan Program dan Kegiatan sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dengan Program Dan Kegiatan DPUPR Tahun 2020

| RPJMD 2016 - 2021 | | | | | RENSTRA & RPJMD KOTA DENPASAR 2016 – 2021 | | | KETERKAITAN | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|---|---|--------|---------|-------------------|-----------------------------|--------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) | KEGIATAN 2020 | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| 1. Pengutamaan Jati diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Bali 2. Peremberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal 3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement) 4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan | 1. Memperkuat jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali | 1. Memperkuatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional | 1. Luas Areal Subak yang dapat dipertahankan (ha) | 1. Pengembangan sektor kebudayaan sebagai landasan pembangunan dan dalam rangka mewujudkan jati diri Kota Denpasar | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran | 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3 | 3 | 10 | 17, 18 | 20, 21 | |
| | 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur | 2. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya | 2. Meningkatkan derajat Kemiskinan | 2. Indeks Tri Hita Karana | 2. Meningkatkan pemberdayaan lembaga adat, subak, sekehaa untuk berperan lebih aktif dalam pembangunan | | 2. Standar harga satuan barang dan jasa pada perencanaan anggaran DPUPR | 2. Survey Harga Satuan Barang dan Jasa | 3 | 3 | 10 | 17, 18 | 20, 21 |
| | 3. Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement) | 3. Mengurangi pengangguran | 3. Mengentaskan Kemiskinan | 3. Indeks Pembangunan Kebudayaan | 3. Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kesenian daerah Bali untuk memperkaya keanekaragaman budaya bangsa didukung oleh iklim, sarana dan prasarana yang memadai | 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3 | 3 | 10 | 16 | 20 |
| | 4. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan | 4. Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | 4. Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat | 4. Angka kemiskinan (%) | 4. Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terpadu melalui peningkatan pelayanan dasar rakyat sandang, pangan dan papan | 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1. Persentase ASN yang mengikuti Bimtek | 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 3 | 3 | 10 | 17, 18 | 20, 21 |
| | 4. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat | 4. Mengurangi pengangguran | 5. Angka Pengangguran (%) | 5. Mendorong tumbuh kembangnya warasaha dengan memfasilitasi peningkatan kapasitas | 4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 1. Panjang Jalan Kondisi baik 2. Tersedianya Jembatan Kondisi Baik | 1. Peningkatan Jalan di Kota Denpasar | 2 | 2 | 9 | 12 | 12 | |

| RPJMD 2016 - 2021 | | | | | RENSTRA & RPJMD KOTA DENPASAR 2016 – 2021 | | | KETERKAITAN | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|---|-------------|--------|---------|-------------------|-----------------------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) | KEGIATAN 2020 | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| 5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana | Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan 5. Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa | 9. Meningkatkan kualitas Infrastruktur | 14. Rumah Tangga terakses system jaringan sanitasi (%) | maupun peningkatan kapasitas maupun perbaikan iklim investasi | 5. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong | 1. Panjang saluran drainase yang dapat mengurangi titik genangan | 1. Operasioanal dan Pemeliharaan Drainase 2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 3. Database Sistem Drainase | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| | | 10. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel | 15. Penduduk Memanfaatkan Air Bersih Terlindungi (%) | 6. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana kesehatan | | | | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| | | 11. Berkembangnya industri Pengolahan dan Perdagangan | 16. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori) | 7. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia yang di mulai sejak usia dini | | | | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| | | 12. Meningkatkan kinerja Lembaga Perkreditan Desa | 17. Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Kategori) | 8. Meningkatkan dan mengembangkan organisasi serta peranan pemuda dalam proses pembangunan | 6. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 1. Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang 2. Panjang Jembatan kondisi baik dan sedang 3. Jumlah Peningkatan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang 4. Jumlah Pemeliharaan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang | 1. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan 2. Peningkatan Jalan Lingkungan 3. Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Permukiman | 2 | 2 | 9 | 12 | 12 |
| | | 13. Meningkatkan perkembangan Ekonomi Masyarakat kecil | 18. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kategori) | 9. Mengupayakan perluasan jaringan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi melalui peningkatan manajemen, mutu dan akses pendidikan | | | | 2 | 2 | 9 | 12 | 12 |
| | | 14. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | 19. Pertumbuhan sector industri pengolahan dalam PDRB (%) 20. Pertumbuhan sector | 10. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan dengan memprioritaskan pada peningkatan | | | | 2 | 2 | 9 | 12 | 12 |

| RPJMD 2016 - 2021 | | | | | RENSTRA & RPJMD KOTA DENPASAR 2016 – 2021 | | | KETERKAITAN | | | | |
|-------------------|--------|---------|---|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) | KEGIATAN 2020 | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| | | | perdagangan dalam PDRB (%) 21. Lembaga Perkreditan Desa Sehat (%) 22. Usaha mikro yang meningkat kategorinya menjadi Usaha Kecil (%) 23. Koperasi yang SHU-nya meningkat 24. Investasi yang tercatat di PTSP 25. Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) 26. Lama Tinggal Wisatawan - Asing - Domestik | pemahaman masyarakat dan peranan perempuan sesuai dengan kesetaraan dan keadilan gender 11. Mewujudkan masyarakat mandiri melalui pembangunan perumahan dan permukiman yang layak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat 12. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dalam menunjang pembangunan Kota Denpasar 13. Mengembangkan jaringan drainase kota yang terintegrasi untuk menanggulangi banjir 14. Mengembangkan pengelolaan Sumber Daya Air, meningkatkan serta tetap menjaga ketersediaan dan kualitas Sumber daya Air dalam menunjang keseimbangan lingkungan | 7. Program Pembinaan Jasa Konstruksi 8. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 9. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 1. Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang tersertifikasi 2. Jumlah usaha jasa konstruksi yang tertib jasa konstruksi 1. Jumlah jalan berleger sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Tersedianya data jalan dan peta sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan 1. Luas areal pertanian terairi saluran irigasi | 1. Pembinaan Jasa Konstruksi 1. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan 2. Updating Data Base Jalan di Kota Denpasar 1.Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi | 2 2 1 1 | 2 2 1 1 | 9 9 1 1 | 5 12 12 1 1 | 5 12 12 14 14 |

| RPJMD 2016 - 2021 | | | | | RENSTRA & RPJMD KOTA DENPASAR 2016 – 2021 | | | KETERKAITAN | | | | | | |
|-------------------|--------|---------|--|--|---|--|--|-------------|--------|---------|-------------------|-----------------------------|---|----|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) | KEGIATAN 2020 | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | | |
| | | | 27. Jumlah Penerimaan Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan (dalam jutaan rupiah) | hidup dalam kerangka Sarbagita | 10. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | 1. Jumlah penduduk yg mendapat akses air minum yang aman 2. Jumlah Sambungan Rumah Skala Kota 3. Jumlah RT terakses IPAL | 1. Pengembangan Sitem Distribusi Air Minum (IPAL & RT.26) 2. Penyediaan Prasaran dan Sarana Air Limbah | 2 | 2 | 9 | 15 | 14 | | |
| | | | 28. Sampah tereduksi (%) Indeks LH | 15. Mengembangkan penyediaan air bersih dan jaringannya serta peningkatan sanitasi lingkungan 16. Mengembangkan sistem angkutan umum masal yang kompetitif dalam rangka mengurangi beban jalan dan kepadatan lalu lintas dan pengelolaan sistem transportasi yang disesuaikan dengan rencana umum Sarbagita | | | | | | | 2 | 2 | 9 | 15 |
| | | | | 17. Pemngembangan sarana dan prasaran transportasi diarahkan untuk mendukung pembangunan kota | 11. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | 1. Terbangunnya bangunan gedung Pemerintah yang memenuhi persyaratan kelayakan bangunan gedung | 1. Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Pasar 2. Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Gedung Kantor 3. Digitalisasi Arsip IMB 4. Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Kesehatan 5. Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Gedung Pendidikan 6. Koordinasi Tata Bangunan 7. Penataan Kawasan Prioritas 8. Penyusunan Kebijakan Tentang Tata Bangunan | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | | |
| | | | 18. Mengembangkan sistem disinsentif dalam upaya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi | | | | | | | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| | | | 19. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengembangkan etika moral | | | | | | | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| | | | 20. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki wawasan profesionalisme, keahlian | | | | | | | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |

| RPJMD 2016 - 2021 | | | | | RENSTRA & RPJMD KOTA DENPASAR 2016 – 2021 | | | KETERKAITAN | | | | |
|-------------------|--------|---------|-------------------|---|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) | KEGIATAN 2020 | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| | | | | keterampilan, dan sikap mental pengawasan 21. Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa 22. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam dunia usaha terutama usaha kecil, menengah koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal | 12. Program Perencanaan Tata Ruang | 1. Peraturan tata ruang yang diundangkan | 1. Penetapan Kebijakan Tentang RDTK, RTRK, dan RTBL 2. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang | 2 2 | 2 2 | 9 9 | 2 2 | 1 2 |
| | | | | 23. Membangun fasilitas pemasaran sebagai pusat regional hasil-hasil produksi pertanian 24. Meningkatkan SDM pengelola LPD dan Pengelolanya 25. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam dunia usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang | 13. Program Pemanfaatan Ruang | 1. Terlayannya masyarakat untuk mendapatkan informasi pemanfaatan ruang tepat waktu 2. Persentase rekomendasi teknis bangunan gedung yang terbit tepat waktu | 1. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 2. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 3. Survey dan Pemetaan | 2 2 2 | 2 2 2 | 9 9 9 | 2 2 9 | 1 1 1 |

| RPJMD 2016 -2021 | | | | | RENSTRA & RPJMD KOTA DENPASAR 2016 – 2021 | | | KETERKAITAN | | | | |
|------------------|--------|---------|-------------------|--|--|---|--|-------------|--------|---------|-------------------|-----------------------------|
| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) | KEGIATAN 2020 | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| | | | | <p>memberdayakan perekonomian rakyat dalam rangka mewujudkan perekonomian kerakyatan</p> <p>26. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu berdasarkan nilai-nilai Budaya dan tradisi daerah sesuai dengan daya dukung dan daya tampung untuk melestarikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup</p> | 14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 1. Turunnya jumlah pelanggaran tata ruang | 1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| | | | | | 15. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | 1. Panjang jalan swadaya masyarakat | 1. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat | 2 | 2 | 9 | 12 | 12 |

1.6 Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pelayanan Dasar, DPUPR Kota Denpasar melaksanakan **15 Program** dan **32 Kegiatan** yang pelaksanaannya dibagi pada 6 bidang dan 1 sekretariat. Program dan kegiatan pada Bidang Bina Marga terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan, Bidang Sumber Daya Air terdiri dari 2 Program dan 3 Kegiatan, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri dari 2 Program dan 4 Kegiatan, Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman terdiri dari 1 Program dan 7 Kegiatan, Bidang Penataan Ruang terdiri dari 4 Program dan 7 Kegiatan, Bidang Jasa Konstruksi dan Bina Program terdiri dari 5 Program dan 5 Kegiatan, Sekretariat terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.2. Survey Harga Satuan Barang dan Jasa
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - 4.1. Peningkatan Jalan di Kota Denpasar
5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
 - 5.1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
 - 5.2. Operasional dan Pemeliharaan Drainase
 - 5.3. Database Sistem Drainase
6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 6.1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
 - 6.2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Permukiman
 - 6.3. Peningkatan Jalan Lingkungan
7. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
 - 7.1. Pembinaan Jasa Kontruksi
8. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan
 - 8.1. Penyusunan Sisem Informasi/ Data Base Jalan
 - 8.2. Updating Data Base Jalan di Kota Denpasar

9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 - 9.1. Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
 - 10.1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
 - 10.2 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (IPAL & RT. 26)
11. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - 11.1 Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Pasar
 - 11.2 Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Gedung Kantor
 - 11.3 Digitalisasi Arsip IMB
 - 11.4 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kesehatan
 - 11.5 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Gedung Pendidikan
 - 11.6 Koordinasi Tata Bangunan
 - 11.7 Penyusunan Kebijakan Tentang Tata Bangunan
 - 11.8 Penataan Kawasan Prioritas
12. Program Perencanaan Tata Ruang
 - 12.1 Penetapan Kebijakan Tentang RDTK, RTRK dan RTBL
 - 12.2 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang
13. Program Pemanfaatan Ruang
 - 13.1 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - 13.2 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang
 - 13.3 Survey dan Pemetaan
14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - 14.1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang
15. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
 - 15.1 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

1.7 Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Denpasar direalisasikan melalui **15 Program dan 32 Kegiatan**, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing perangkat daerah sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintah dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 81.384.128.782,30** dengan rincian sebagai berikut:

- ANGGARAN PADA DPUPR KOTA DENPASAR T.A 2020
 - a. BELANJA LANGSUNG : Rp 63.946.069.482,30
 - b. BELANJA TIDAK LANGSUNG : Rp 17.438.059.300,00
 - TOTAL : Rp. 81.384.128.782,30**

- RENCANA DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (BELANJA LANGSUNG) DPUPR KOTA DENPASAR T.A 2020

| | RENCANA | REALISASI |
|----------|----------------------------------|------------------------------------|
| FISIK | 100 % | 96,94 % |
| KEUANGAN | Rp. 63.946.069.482,30 (100 %) | Rp. 60.663.738.571,00 (94,86 %) |

- RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN (BELANJA TIDAK LANGSUNG) DPUPR KOTA DENPASAR T.A 2020

| | RENCANA | REALISASI |
|----------|----------------------------------|------------------------------------|
| FISIK | 100 % | 100 % |
| KEUANGAN | Rp. 17.438.059.300,00 (100 %) | Rp. 17.231.076.470,00 (98,81 %) |

- TOTAL RENCANA DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG) DPUPR KOTA DENPASAR T.A 2020

| | RENCANA | REALISASI |
|----------|----------------------------------|------------------------------------|
| FISIK | 100 % | 98,47 % |
| KEUANGAN | Rp. 81.384.128.782,30 (100 %) | Rp. 77.894.815.041,00 (95,71 %) |

BAB II PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Strategis sebagaimana disampaikan pada Bab I diatas, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang menyajikan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (output) dan outcome dari sasaran strategis dan strategi pencapaiannya. RKT merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja dalam satu tahun anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar yang terdiri dari 7 (tujuh) sasaran strategis yang menjadi IKU PD dengan 15 Program dan 32 Kegiatan dengan rincian sebagaimana terlampir. RKT disusun mengacu pada program dan kegiatan yang ditetapkan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, tujuan, sasaran dan strategi. Keterkaitan program, indikator program (outcome), kegiatan, indicator dengan tujuan PD, sasaran PD IKU Kota dan IKU PD sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Keterkaitan Program, Indikator Program (outcome), Kegiatan, Indikator dengan Tujuan PD dan Sasaran PD

| PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) | KEGIATAN 2020 | KETERKAITAN RENSTRA DPUPR DENGAN RPJMD | | | | |
|---|---|---|--|--------|---------|-------------------|-----------------------------|
| | | | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran | 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3 | 3 | 10 | 17, 18 | 20, 21 |
| | 2. Standar harga satuan barang dan jasa pada perencanaan anggaran DPUPR | 2. Survey Harga Satuan Barang dan Jasa | 3 | 3 | 10 | 17, 18 | 20, 21 |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur | 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3 | 3 | 10 | 16 | 20 |
| 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1. Persentase ASN yang mengikuti Bimtek | 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 3 | 3 | 10 | 17, 18 | 20, 21 |
| 4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 1. Persentase Jalan Kondisi baik 2. Persentase Jembatan Kondisi Baik | 1. Peningkatan Jalan di Kota Denpasar | 2 | 2 | 9 | 12 | 12 |
| 5. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong | 1. Presentase saluran drainase yang dapat mengurangi waktu genangan | 1. Operasioanal dan Pemeliharaan Drainase | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| | | 2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 |
| | | 3. Database Sistem Drainase | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 |

| PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) | KEGIATAN 2020 | KETERKAITAN RENSTRA DPUPR DENGAN RPJMD | | | | |
|---|---|---|--|--------|---------|-------------------|-----------------------------|
| | | | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| 6. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 1. Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang | 1.Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan | 2 | 2 | 9 | 12 | 12 |
| | 2. Presentase jembatan kondisi baik dan sedang | 2.Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Permukiman | 2 | 2 | 9 | 12 | 12 |
| | 3. Presentase Peningkatan jalan lingkungan kondisi baik dan sedang | 3.Peningkatan jalan lingkungan | 2 | 2 | 9 | 12 | 12 |
| | 4. Presentase Pemeliharaan lingkungan kondisi baik dan sedang | | | | | | |
| 7. Program Pembinaan Jasa Konstruksi | 1. Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang tersertifikasi 2. Presentase usaha jasa konstruksi yang tertib jasa konstruksi | 1. Pembinaan Jasa Konstruksi | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 |
| 8. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan | 1. Persentase jalan berleger sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 1. Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan | 2 | 2 | 9 | 12 | 12 |
| | 2. Tersedianya data jalan dan peta sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan | 2. Updating Data Base Jalan di Kota Denpasar | 2 | 2 | 9 | 12 | 12 |
| 9. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | 1. Persentase areal pertanian terairi saluran irigasi | 1. Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 10. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | 1. Peresentase penduduk yg mendapat akses air minum yang aman | 1. Pengembangan Sitem Distribusi Air Minum (IPAL & RT.26) | 2 | 2 | 9 | 15 | 14 |
| | 2. Persentase Sambungan Rumah Skala Kota 3. Persentase RT terakses IPAL | 2. Penyediaan Prasaran dan Sarana Air Limbah | 2 | 2 | 9 | 15 | 14 |

| PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) | KEGIATAN 2020 | KETERKAITAN RENSTRA DPUPR DENGAN RPJMD | | | | |
|---|---|--|--|--------|---------|-------------------|-----------------------------|
| | | | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| 11. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | 1. Terbangunnya bangunan gedung Pemerintah yang memenuhi persyaratan kelayakan bangunan gedung | 1. Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Pasar | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| | | 2. Pembangunan /Peningkatan Infrastruktur Gedung Kntor | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| | | 3. Digitalisasi Arsip IMB | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| | | 4. Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kesehatan | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| | | 5. Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Gedung Pendidikan | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| | | 6. Koordinasi Tata Bangunan | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| | | 7. Penataan Kawasan Prioritas | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| | | 8. Penyusunan Kebijakan Tentang Tata Bangunan | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| 12. Program Perencanaan Tata Ruang | 1. Peraturan tata ruang yang diundangkan | 1. Penetapan Kebijakan Tentang RDTK, RTRK, dan RTBL | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| | | 2. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| 13. Program Pemanfaatan Ruang | 1. Terlayannya masyarakat untuk mendapatkan informasi pemanfaatan ruang tepat waktu 2. Persentase rekomendasi teknis bangunan gedung yang terbit tepat waktu | 1. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| | | 2. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| | | 3. Survey dan Pemetaan | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| 14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 1. Turunnya jumlah pelanggaran tata ruang | 1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| 15. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | 1. Panjang jalan swadaya masyarakat | 1. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat | 2 | 2 | 9 | 12 | 12 |

2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, dalam hal ini antara Walikota Denpasar dengan Kepala OPD/Pengguna Anggaran untuk mewujudkan target kinerja tertentu (*out put* dan *out come*) berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja yang disepakati untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja sebagaimana dijabarkan dalam PK terlampir. PK disusun mengacu pada indikator yang sudah ditetapkan dengan upaya pencapaian melalui penetapan program dan kegiatan yang dilangsungkan setiap tahun.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi

Seluruh indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang T.A 2020 telah dapat dilaksanakan dan capaian target dari indikator kinerja tersebut dan mengalami peningkatan dari target T.A 2019 sebagaimana tersaji pada tabel. 3.1 mengenai Pengukuran Kinerja T.A. 2020 dan tabel 3.2 mengenai Pengukuran Kinerja T.A. 2019 dibawah ini.

Tabel. 3.1
Pengukuran Kinerja T.A 2020

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian / (%) | Keterangan | |
|----|--|--|----------|---|---------------|------------|----------------|
| | | | | | | Tercapai | Tidak Tercapai |
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten/Kota | 1. Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten/ Kota baik dan sedang | 78,84 % | Panjang jalan memenuhi kriteria kondisi jalan baik dan sedang = $\frac{378.501,40}{486.084,35} \times 100 \% = 77,87 \%$ | 77,87 | √ | |
| | | 2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota | 100,00 % | Panjang jalan penghubung dan pusat produksi = $\frac{486.084,35}{486.084,35} \times 100 \% = 100 \%$ | 100,00 | √ | |
| 2 | Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | 1. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya | 100,00 % | Ketersediaan air irigasi (liter/detik) pada setiap musim hujan = $\frac{604}{604} \times 100 \% = 100 \%$ | 100,00 | √ | |
| | | 2. Persentase tersediannya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari | 100,00 % | Ketersediaan air baku (M3/tahun) dari instalasi pengolah air = $\frac{897.298}{897.298} \times 100 \% = 100 \%$ | 100,00 | √ | |
| 3 | Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan | 1. Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman | 47,84 % | Masyarakat terlayani air minum = $\frac{517.691}{941.600} \times 100 \% = 54,98 \%$ | 54,98 | √ | |
| 4 | Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan | 1. Persentase penduduk yang terlayani system jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun | 62,50 % | Luasan daerah tergenang = $\frac{748.209}{947.100} \times 100 \% = 79 \%$ | 79,00 | √ | |
| 5 | Meningkatnya Daerah Bebas Banjir atau Genangan | 1. Persentase pengurangan genangan | 48,27 % | Pengurangan Genangan = $\frac{39.984}{67.165} \times 100 \% = 59,38 \%$ | 59,38 | √ | |
| 6 | Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung Pemerintah Kota | 1. Persentase bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung | 5,43 % | Gedung Pemerintah yang layak = $\frac{5}{92} \times 100 \% = 5,43 \%$ | 5,43 | √ | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian / (%) | Keterangan | |
|----|---|--|----------|--|---------------|------------|----------------|
| | | | | | | Tercapai | Tidak Tercapai |
| 7 | Meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang | 1. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital | 71,70 % | Informasi peta analog = $\frac{43 \times 2}{(17+43) \times 2} \times 100\% = 71,70\%$ | 71,70 | √ | |
| 8 | Meningkatnya kualitas layanan perijinan jasa konstruksi | 1. Persentase tersedianya layanan rekomendasi teknis Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan waktu pemerintah paling lama 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap | 100,00 % | Permohonan IUJK yang diterbitkan = $\frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$ | 100,00 | √ | |

Tabel. 3.2
Pengukuran Kinerja T.A 2019

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian / (%) | Keterangan | |
|----|--|--|----------|---|---------------|------------|----------------|
| | | | | | | Tercapai | Tidak Tercapai |
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten/Kota | 1. Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten/ Kota baik dan sedang | 78,84 % | Panjang jalan memenuhi kriteria kondisi jalan baik dan sedang = $\frac{385.188,90}{486.084,35} \times 100\% = 79,24\%$ | 79,24 | √ | |
| | | 2. Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota | 100,00 % | Panjang jalan penghubung dan pusat produksi = $\frac{486.084,35}{486.084,35} \times 100\% = 100\%$ | 100,00 | √ | |
| 2 | Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | 1. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya | 100,00 % | Ketersediaan air irigasi (liter/detik) pada setiap musim hujan = $\frac{604}{604} \times 100\% = 100\%$ | 100,00 | √ | |
| | | 2. Persentase tersediannya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari | 100,00 % | Ketersediaan air baku (M3/tahun) dari instalasi pengolahan air = $\frac{897.298}{897.298} \times 100\% = 100\%$ | 100,00 | √ | |
| 3 | Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman perkotaan | 1. Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman | 47,84 % | Masyarakat terlayani air minum = $\frac{517.691}{941.600} \times 100\% = 54,98\%$ | 54,98 | √ | |
| 4 | Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan | 1. Persentase penduduk yang terlayani system jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun | 62,50 % | Luasan daerah tergenang = $\frac{748.209}{947.100} \times 100\% = 79\%$ | 79,00 | √ | |
| 5 | Meningkatnya Daerah Bebas Banjir atau Genangan | 1. Persentase pengurangan genangan | 48,27 % | Pengurangan Genangan = $\frac{39.984}{67.165} \times 100\% = 59,38\%$ | 59,38 | √ | |
| 6 | Meningkatnya kualitas bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung Pemerintah Kota | 1. Persentase bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung | 5,43 % | Gedung Pemerintah yang layak = $\frac{5}{92} \times 100\% = 5,43\%$ | 5,43 | √ | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian / (%) | Keterangan | |
|----|---|--|----------|--|---------------|------------|----------------|
| | | | | | | Tercapai | Tidak Tercapai |
| 7 | Meningkatnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang | 1. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital | 71,70 % | Informasi peta analog = $\frac{43 \times 2}{(17+43) \times 2} \times 100\% = 71,70\%$ | 71,70 | √ | |
| 8 | Meningkatnya kualitas layanan perijinan jasa konstruksi | 1. Persentase tersedianya layanan rekomendasi teknis Ijin Usaha Jasa Konstruksi dengan waktu pemerintah paling lama 2 hari kerja setelah persyaratan lengkap | 100,00 % | Permohonan IUJK yang diterbitkan = $\frac{136}{136} \times 100\% = 100\%$ | 100,00 | √ | |

Penanganan daerah rawan genangan / banjir dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah genangan yang cukup tinggi dan berdampak besar bagi masyarakat, khususnya dampak bagi kelancaran transportasi, kesehatan lingkungan dan fasilitas permukiman masyarakat. Titik daerah rawan genangan di Kota Denpasar selalu berubah seiring dengan berkembangnya daerah pemukiman masyarakat dan adanya pengalihan fungsi lahan (terlampir peta daerah rawan genangan/banjir). Namun demikian DPUPR Kota Denpasar mengupayakan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah meningkatnya daerah rawan genangan/banjir guna mencegah sebaran dampak genangan/banjir.

Kualitas jalan yang baik dan mantap di Kota Denpasar sangat dibutuhkan, mengingat tingkat kepadatan lalu lintas dan mobilitas masyarakat yang berdomisili di Kota Denpasar maupun masyarakat komuter yang menuju/melintasi Kota Denpasar sangat tinggi sehingga akan meningkatkan resiko keselamatan pengguna jalan apabila kondisi/kualitas jalan yang tidak baik dan tidak mantap. Masalah kemandapan jalan menjadikan perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Denpasar dengan menetapkannya sebagai sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja DPUPR Kota Denpasar. Secara bertahap prosentase kemandapan jalan-jalan utama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Denpasar akan terus ditingkatkan dan dijaga. Dengan kualitas jalan yang baik dan mantap diharapkan akan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan mengurangi resiko keselamatan dan tingkat kecelakaan pengguna jalan di Kota Denpasar.

Disamping kemandapan jalan, umur pakai jalan juga perlu mendapatkan perhatian, mengingat semakin panjang umur jalan maka intensitas perbaikan akan semakin berkurang sehingga keamanan, kenyamanan dan gangguan terhadap pengguna jalan dalam rangka pemeliharaan jalan akan semakin sedikit. Semakin panjang umur pakai jalan utama kota, mencerminkan semakin baiknya kualitas jalan dan juga akan berdampak pada semakin tingginya efisiensi anggaran untuk pemeliharaan jalan

pertahunnya dan efisiensi biaya tersebut dapat dialihkan untuk peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan atau pembangunan infrastruktur lainnya. Dengan semakin berkembangnya wilayah permukiman masyarakat di Kota Denpasar maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara bertahap meningkatkan aksesibilitas untuk memudahkan masyarakat ke pusat- pusat kegiatan (PK). Dengan meningkatnya aksesibilitas menuju PK diharapkan dapat mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat sebagaimana misi pemerintah Kota Denpasar.

Kemacetan lalu lintas di Kota Denpasar merupakan masalah yang mendapatkan perhatian khusus mengingat Kota Denpasar sebagai daerah pariwisata, perlintasan transportasi darat antar daerah dan antar pulau serta pusat ibukota Propinsi Bali. Kemacetan lalu lintas khususnya pada jalan utama di Kota Denpasar disebabkan berbagai faktor selain karena kualitas jalan dan kuantitas jalan adalah disebabkan semakin bertambahnya volume kendaraan bermotor, tidak disiplinnya pengguna jalan dalam berlalu lintas, parkir kendaraan di badan jalan, penggunaan kendaraan bermotor (mobil) untuk mengantar dan menjemput siswa sekolah, dan banyaknya persimpangan jalan yang menyebabkan melambatnya laju kendaraan. Mengingat rata-rata bentang jalan di wilayah Kota Denpasar yang pendek dan dengan lebar yang tidak sepadan dengan volume kendaraan, mengakibatkan kemacetan di satu ruas jalan berdampak pada ruas jalan yang lainnya. Terkait dengan hal tersebut diatas DPUPR Kota Denpasar melakukan upaya-upaya pemeliharaan jalan guna mengurangi pelambatan laju kendaraan dan melakukan peningkatan jalan khususnya jalan tembus jalan alternatif untuk memecah arus lalu lintas dengan maksud untuk mengurangi kemacetan pada satu titik ruas jalan yang dapat berdampak kemacetan pada ruas jalan yang lain.

Keterbatasan kemampuan Pemerintah Kota Denpasar dalam menyediakan fasilitas infrastruktur menyebabkan belum meratanya pembangunan infrastruktur di lingkungan permukiman. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan lingkungan. Melalui partisipasi masyarakat akan dapat mengefektifkan upaya peningkatan jalan baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan peningkatan jalan. Bentuk partisipasi masyarakat adalah merencanakan, melaksanakan dan membiayai peningkatan jalan di lingkungan permukimannya, dan Pemerintah Kota Denpasar membantu penyediaan aspal dan paving serta mesin penggilas (*wheel roller*). Partisipasi masyarakat akan dapat meningkatkan efisiensi anggaran pemerintah yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur lainnya. Diharapkan partisipasi masyarakat akan terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga percepatan pembangunan infrastruktur jalan dapat tercapai dan merata.

Realisasi Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2020 tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Adapun realisasi Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja terhadap Renstra dan RPJMD Tahun 2020 telah tercapai sesuai target, sebagaimana terlampir pada tabel 3.3 dan 3.4.

Perencanaan dan kesungguhan serta komitmen pelaksanaan program dan kegiatan adalah faktor utama keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Faktor penyebab terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah rendahnya profesionalisme dan komitmen penyedia barang dan jasa pelaksana pekerjaan untuk berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Dalam rangka mencegah terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, maka diperlukan upaya-upaya pemilihan penyedia barang dan jasa melalui seleksi atau evaluasi yang lebih mendalam.

Keterbatasan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien yaitu dengan membagi habis semua kegiatan sesuai dengan Uraian Tugasnya, serta mengefektifkan koordinasi antar bidang sehingga informasi, asistensi dan kolaborasi penyelesaian permasalahan yang ada dapat dilakukan dengan baik.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan Pemberian rekomendasi teknis (Rekomtek) ijin usaha Jasa Kontruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar telah menerapkan layanan permohonan dan penerbitan rekomendasi teknis secara online melalui aplikasi Rajakol (Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Kontruksi Online), serta telah menerapkan Tanda Tangan Elektronik.

Dengan diterapkannya layanan Rekomtek secara online memberikan dampak efisiensi proses pengurangan pengguna kertas dan tinta, pengguna mobilitas masyarakat ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar. Dari pemohon dapat langsung mencetak sendiri rekomendasi setelah dokumen disetujui.

Berdasarkan hasil survey secara elektronik yang dilakukan terhadap pemohon Rekomendasi Teknis IUJK (Rekomtek) dari 44 pemohon Rekomtek yang diterbitkan, pemohon yang mengisi Kuisisioner secara elektronik sebanyak 33 pemohon (75%). Menurut pengolahan data survey kepuasan masyarakat per responden dan per unsur pelayanan rekomendasi ijin usaha kontruksi online (RAJAKOL) tahun 2020. Nilai SKM unit pelayanan sebesar 86,78.

Tabel 3.3

Target dan Realisasi Program dan Kegiatan DPUPR T.A. 2020

| NO. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%) | Keterangan | | |
|------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | *) Alasan/ Penjelasan | **) Solusi/ Strategi Pencapaian Program | ***) Anggaran Perubahan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 100 % | 98,56 | | | |
| | 1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 100 % | 98,32 | Memenuhi Target | | 14.725.348.994,00 |
| | 1.2 Survey Harga Satuan Barang dan Jasa | 100 % | 100 % | 98,80 | Memenuhi Target | | 90.370.000,00 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 % | 100 % | 90,58 | | | |
| | 2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 % | 100 % | 90,58 | Memenuhi Target | | 9.612.929.256,00 |
| III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100 % | 100 % | 99,99 | | | |
| | 3.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100 % | 100 % | 99,99 | Memenuhi Target | | 205.096.900,00 |
| IV | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | 100 % | 100 % | 88,44 | | | |
| | 4.1 Peningkatan Jalan di Kota Denpasar | 100 % | 100 % | 88,44 | Memenuhi Target | | 553.121.000,00 |
| V | Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong | 100 % | 100 % | 74,78 | | | |
| | 5.1 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- Gorong | 100 % | 100 % | 99,09 | Memenuhi Target | | 67.350.000,00 |
| | 5.2 Operasional dan Pemeliharaan Drainase | 100 % | 100 % | 89,03 | Memenuhi Target | | 5.341.619.500,00 |
| | 5.3 Database Sistem Drainase | 100 % | 100 % | 36,22 | Memenuhi Target | | 676.250,00 |
| VI | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 100 % | 100 % | 88,25 | | | |
| | 6.1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan | 100 % | 100 % | 76,07 | Memenuhi Target | | 1.368.971.850,00 |
| | 6.2 Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Permukiman | 100 % | 100 % | 89,27 | Memenuhi Target | | 492.226.300,00 |
| | 6.3 Peningkatan Jalan Lingkungan | 100 % | 100 % | 99,43 | Memenuhi Target | | 6.525.207.536,00 |

| NO. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%) | Keterangan | | |
|------|--|--|---|--|--|-----------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | *) Alasan/ Penjelasan | **) Solusi/ Strategi Pencapaian Program | ***) Anggaran Perubahan |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VII | Program Pembinaan Jasa Kontruksi | | 100 % | 100 % | 99,26 | | | |
| | 7.1 | Pembinaan Jasa Kontruksi | 100 % | 100 % | 99,26 | Memenuhi Target | | 57.562.500,00 |
| VIII | Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan | | 100 % | 100 % | 88,16 | | | |
| | 8.1 | Penyusunan Sisem Informasi/ Data Base Jalan | 100 % | 100 % | 97,80 | Memenuhi Target | | 401.609.500,00 |
| | 8.2 | Updating Data Base Jalan di Kota Denpasar | 100 % | 100 % | 88,52 | Memenuhi Target | | 409.500,00 |
| IX | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | | 100 % | 100 % | 89,71 | | | |
| | 9.1 | Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi | 100 % | 100 % | 89,71 | Memenuhi Target | | 1.350.827.929,00 |
| X | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | | 100 % | 100 % | 99,57 | | | |
| | 10.1 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | 100 % | 100 % | 99,64 | Memenuhi Target | | 459.525.456,00 |
| | 10.2 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (IPAL & RT. 26) | 100 % | 100 % | 99,50 | Memenuhi Target | | 111.955.200,00 |
| XI | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | 100 % | 100 % | 81,99 | | | |
| | 11.1 | Pembangunan/ Peningkatan Imfrastruktur Pasar | 100 % | 100 % | 98,93 | Memenuhi Target | | 61.935.000,00 |
| | 11.2 | Pembangunan/ Peningkatan Imfrastruktur Gedung Kantor | 100 % | 100 % | 88,85 | Memenuhi Target | | 6.983.630.750,00 |
| | 11.3 | Digitalisasi Arsip IMB | 100 % | 100 % | 70,29 | Memenuhi Target | | 1.246.562,50 |
| | 11.4 | Pembangunan/ Peningkatan Imfrastruktur Kesehatan | 100 % | 100 % | 97,29 | Memenuhi Target | | 98.405.625,00 |

| NO. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | | Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020 | Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (%) | Keterangan | | |
|-------------|---|--|---|---|--|-----------------------|--|--------------------------|
| | | | | | | *) Alasan/ Penjelasan | **) Solusi/ Strategi Pencapaian Program | ***) Anggaran Perubahan |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11.5 | Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Pendidikan | 100 % | 100 % | 99,98 | Memenuhi Target | | 13.557.983.248,80 |
| | 11.6 | Koordinasi Tata Bangunan | 100 % | 100 % | 99,51 | Memenuhi Target | | 914.739.500,00 |
| | 11.7 | Penataan Kawasan Prioritas | 100 % | 100 % | 99,12 | Memenuhi Target | | 304.620.500,00 |
| | 11.8 | Penyusunan Kebijakan Tentang Tata Bangunan | 100 % | 2,01 % | 2,01 | Tidak Memenuhi Target | Adanya pelimpahan kewenangan retribusi IMB dan revisi UU Cipta Kerja sehingga Perwali Bangunan Gedung belum dapat dilaksanakan | 66.830.875,00 |
| XII | Program Perencanaan Tata Ruang | | 100 % | 100 % | 96,79 | | | |
| | 12.1 | Penetapan Kebijakan Tentang RDTK, RTRK dan RTBL | 100 % | 100 % | 93,59 | Memenuhi Target | | 371.865.500,00 |
| | 12.2 | Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang | 100 % | 100 % | 100 | Memenuhi Target | | 10.349.500,00 |
| XIII | Program Pemanfaatan Ruang | | 100 % | 100 % | 98,65 | | | |
| | 13.1 | Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 100 % | 100 % | 95,96 | Memenuhi Target | | 80.652.000,00 |
| | 13.2 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang | 100 % | 100 % | 100 | Memenuhi Target | | 13.709.000,00 |
| | 13.3 | Survey dan Pemetaan | 100 % | 100 % | 100 | Memenuhi Target | | 210.000,00 |
| XIV | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | 100 % | 100 % | 75,56 | | | |
| | 14.1 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang | 100 % | 100 % | 75,56 | Memenuhi Target | | 114.097.250,00 |
| XV | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | | 100 % | 100 % | 100 | | | |
| | 15.1 | Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat | 100 % | 100 % | 100 | Memenuhi Target | | 987.500,00 |
| | JUMLAH | | 100 % | 96,94 % | 94,86 | | | 63.946.069.482,30 |

3.2 Realisasi Anggaran

Cara untuk mencapai target kinerja Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian yang telah ditargetkan (*output*) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar. Penyelesaian fisik kegiatan yang ditargetkan sebagaimana DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tidak dapat terealisasi sesuai target. Capaian realisasi fisik (*output*) adalah sebesar 98,47 %. Pembiayaan untuk capaian realisasi RKT dan PK atau realisasi keuangan adalah sebesar 95,71 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.4 tentang Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Relisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2020

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | | TARGET | | REALISASI | | |
|------------|--|---|--------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|
| | | | FISIK | KEUANGAN (Rp) | FISIK | KEUANGAN (Rp) | % |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | 98,56 |
| | 1.1 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 % | 14.725.348.994,00 | 100 % | 14.478.273.053,00 | 98,32 |
| | 1.2 | Survey Harga Satuan Barang dan Jasa | 100 % | 90.370.000,00 | 100 % | 90.194.955,00 | 98,80 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | 90,58 |
| | 2.1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 % | 9.612.929.256,00 | 100 % | 8.707.891.052,00 | 90,58 |
| III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | 99,99 |
| | 3.1 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100 % | 205.095.900,00 | 100 % | 205.095.300,00 | 99,99 |
| IV | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | | | | | | 88,44 |
| | 4.1 | Peningkatan Jalan di Kota Denpasar | 100 % | 553.121.000,00 | 100 % | 489.186.138,00 | 88,44 |
| V | Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong | | | | | | 74,78 |
| | 5.1 | Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong | 100 % | 67.350.000,00 | 100 % | 66.741.700,00 | 99,09 |
| | 5.2 | Operasional dan Pemeliharaan Drainase | 100 % | 5.341.619.500,00 | 100 % | 4.756.098.615,00 | 89,03 |
| | 5.3 | Database Sistem Drainase | 100 % | 676.250,00 | 100 % | 245.000,00 | 36,22 |

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | | TARGET | | REALISASI | | |
|-------------|---|---|--------|------------------|-----------|------------------|--------------|
| | | | FISIK | KEUANGAN (Rp) | FISIK | KEUANGAN (Rp) | % |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| VI | Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | | | | | 88,25 |
| | 6.1 | Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan | 100 % | 1.368.971.850,00 | 100 % | 1.041.445.401,00 | 76,07 |
| | 6.2 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Permukiman | 100 % | 492.226.300,00 | 100 % | 439.456.771,00 | 89,27 |
| | 6.3 | Peningkatan Jalan Lingkungan | 100 % | 6.525.975.536,00 | 100 % | 6.489.081.815,00 | 99,43 |
| VII | Program Pembinaan Jasa Kontruksi | | | | | | 99,26 |
| | 7.1 | Pembinaan Jasa Kontruksi | 100 % | 57.562.500,00 | 100 % | 57.140.000,00 | 99,26 |
| VIII | Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan | | | | | | 88,16 |
| | 8.1 | Penyusunan Sisem Informasi/ Data Base Jalan | 100 % | 401.609.500,00 | 100 % | 392.804.440,00 | 97,80 |
| | 8.2 | Updating Data Base Jalan di Kota Denpasar | 100 % | 409.500,00 | 100 % | 362.500,00 | 88,52 |
| IX | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | | | | | | 89,71 |
| | 9.1 | Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi | 100 % | 1.350.827.929,00 | 100 % | 1.211.952.814,00 | 89,71 |
| X | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah | | | | | | 99,57 |
| | 10.1 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | 100 % | 458.757.456,00 | 100 % | 457.132.000,00 | 99,64 |
| | 10.2 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (IPAL & RT. 26) | 100 % | 111.955.200,00 | 100 % | 111.405.200,00 | 99,50 |
| XI | Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | | | | | 81,99 |
| | 11.1 | Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Pasar | 100 % | 61.935.000,00 | 100 % | 61.274.500,00 | 98,93 |
| | 11.2 | Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Gedung Kantor | 100 % | 6.983.630.750,00 | 100 % | 6.205.351.273,00 | 88,85 |
| | 11.3 | Digitalisasi Arsip IMB | 100 % | 1.246.562,50 | 100 % | 876.250,00 | 70,29 |
| | 11.4 | Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Kesehatan | 100 % | 98.405.625,00 | 100 % | 95.742.000,00 | 97,29 |

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | | TARGET | | REALISASI | | |
|-------------|---|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| | | | FISIK | KEUANGAN (Rp) | FISIK | KEUANGAN (Rp) | % |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 11.5 | Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Gedung Pendidikan | 100 % | 13.557.983.248,80 | 100 % | 13.555.480.105,00 | 99,98 |
| | 11.6 | Koordinasi Tata Bangunan | 100 % | 914.739.500,00 | 100 % | 910.272.500,00 | 99,51 |
| | 11.7 | Penyusunan Kebijakan Tentang Tata Bangunan | 100 % | 66.830.875,00 | 2,01 % | 1.343.500,00 | 2,01 |
| | 11.8 | Penataan Kawasan Prioritas | 100 % | 304.620.500,00 | 100 % | 301.962.789,00 | 99,12 |
| XII | Program Perencanaan Tata Ruang | | | | | | 96,79 |
| | 12.1 | Penetapan Kebijakan Tentang RDTK, RTRK dan RTBL | 100 % | 371.865.500,00 | 100 % | 348.049.300,00 | 93,59 |
| | 12.2 | Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang | 100 % | 10.349.500,00 | 100 % | 10.349.500,00 | 100 |
| XIII | Program Pemanfaatan Ruang | | | | | | 98,65 |
| | 13.1 | Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 100 % | 80.652.000,00 | 100 % | 77.401.600,00 | 95,96 |
| | 13.2 | Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang | 100 % | 13.709.000,00 | 100 % | 13.709.000,00 | 100 |
| | 13.3 | Survey dan Pemetaan | 100 % | 210.000,00 | 100 % | 210.000,00 | 100 |
| XIV | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | | | | | | 75,56 |
| | 14.1 | Pengawasan Pemanfaatan Ruang | 100 % | 114.097.250,00 | 100 % | 86.222.000,00 | 75,56 |
| XV | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | | | | | | 100 |
| | 15.1 | Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat | 100 % | 987.500,00 | 100 % | 987.500,00 | 100 |
| | JUMLAH | | 100 % | 63.946.069.482,30 | 96,94 % | 60.663.738.571,00 | 94,86 |

3.3 Permasalahan dan Solusi

| NO | PERMASALAHAN | SOLUSI |
|----|--|---|
| 1 | <p>Terdapat Deviasi Progres Fisik dan Keuangan.</p> <p>Progres Fisik :</p> <p style="padding-left: 40px;">Rencana : 100 %</p> <p style="padding-left: 40px;">Realisasi : 98,47 %</p> <p style="padding-left: 40px;">Deviasi :-1,53 %</p> <p>Terjadinya Deviasi fisik sebesar -1,53 % (98,47 %) tersebut disebabkan karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pelimpahan kewenangan penerbitan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang semula diterbitkan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu) Kota Denpasar menjadi kewenangan DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kota Denpasar. - Adanya RUU Cipta Kerja yang berpengaruh terhadap Perwali Bangunan Gedung belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu penetapan UU Cipta Kerja dan revisi Perda Bangunan Gedung yang di sesuaikan dengan UU Cipta Kerja. | <p>Penyusunan Perwali Bangunan Gedung akan diusulkan pada T.A 2022.</p> |
| 2 | <p>Progres Keuangan</p> <p style="padding-left: 40px;">Rencana : 100 %</p> <p style="padding-left: 40px;">Realisasi : 95,71 %</p> <p style="padding-left: 40px;">Deviasi :-4,29 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deviasi Keuangan sebesar -4,29 % (95,71 %) karena adanya target fisik yang kurang dari 100 %, efisiensi melalui pengadaan Barang dan Jasa di bawah pagu / HPS, dan adanya Deviasi belanja tidak langsung sebesar -1,19 % (98,81 %) karena penganggaran sesuai kebutuhan ditambah cadangan dana, yang di alokasikan untuk gaji CPNS dan tunjangan kenaikan pangkat PNS. | |

BAB IV

INOVASI DPUPR YANG MASUK DALAM IGA (INOVATION GOVERNMENT AWARD)

4.1 TAKSU BLI RAI (Tata Kualitas Sungai Untuk Bersih, Lestari, Ramah dan Indah)

Kondisi lingkungan sungai yang kotor, tidak tertata dan menjadi sumber aroma yang tidak sedap sebagai akibat masih banyaknya masyarakat yang membuang limbah padat / sampah dan cair ke sungai adalah kondisi Tukad Badung yang sangat tidak diharapkan dalam upaya menjadikan Kota Denpasar khususnya kawasan heritage yang sehat, indah dan lestari. Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga kebersihan sungai dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan menyediakan layanan pengangkutan sampah serta menyediakan tempat pembuangan sampah sementara, namun upaya ini dirasa masih belum dapat merubah perilaku sebagian masyarakat untuk tidak membuang limbah/sampah ke sungai . Berangkat dari kondisi tersebut Bpk.WaliKota Denpasar mengarahkan untuk melakukan revitalisasi / penataan Tukad Badung sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat untuk sadar dan berperan aktif menjaga kebersihan sungai sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka bagi masyarakat, mempercantik wajah kota, menyediakan obyek wisata baru serta menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar, maka dirancang untuk menata Tukad Badung secara fisik dengan konstruksi yang berfungsi untuk penguatan tanggul dan bantaran sungai dan secara arsitektural untuk mempercantik wajah sungai dengan bernuansakan arsitektur tradisional Bali dengan konsep Taman yang memanfaatkan landscape sebanyak mungkin untuk dapat dimanfaatkan sebagai ruang public yang ramah bagi semua kalangan. Ssecara philosophy dan spiritual penataan Tukad Badung adalah berlandaskan konsep Tri Hita Karana yaitu terciptanya kondisi keharmonisan antar manusia dengan manusia, manusia dengan alam / lingkungan dan manusia dengan Tuhan. Pembangunan fisik dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama pada tahun anggaran 2017 sepanjang 548 M dan pada tahun anggaran 2018 sepanjang 165 M. Dengan tertatanya Tukad Badung diharapkan masyarakat teredukasi dan menumbuhkan rasa malu untuk mengotori sungai dan terbangunnya mind set hidup bersih, dan sekaligus menikmati betapa indah dan nyamannya hidup bersih dilingkungan yang bebas sampah.

4.2 RAJAKOL (Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi Online)

RAJAKOL (Rekomendasi Jasa Konstruksi Online) merupakan suatu sistem berbasis aplikasi web, dan android yang digunakan dalam pengurusan rekomendasi teknis IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi) Nasional di lingkungan Kota Denpasar.

4.3 SIJALAK (Sistem Informasi jalan Kota Denpasar)

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital di Pemerintahan pada era saat ini dan yang akan datang adalah merupakan suatu keharusan dan tidak dapat dihindarkan. Pelayanan Publik yang cepat, tepat terukur dan berkepastian serta kebutuhan kecepatan, keakurasian, ketersediaan berbagai jenis data dan informasi oleh masyarakat dari berbagai lapisan yang harus disediakan oleh Pemerintah adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kota Denpasar. Dengan tersedianya pelayanan publik dan penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang berbasis teknologi digital diharapkan akan mampu mendorong percepatan penguasaan teknologi digital serta memperkecil gap pengetahuan dan penerapan teknologi digital baik di lingkungan Pemerintah maupun masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar. Dalam upaya menyediakan kemudahan akses informasi data dan pelayanan publik secara digital serta memenuhi harapan-harapan sebagaimana diuraikan di atas maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar membangun portal sistem teknologi informasi berbasis website Dama Mandala yang di dalam terdapat aplikasi SIJALAK.

SIJALAK (Sistem Informasi Jalan Kota) Denpasar adalah aplikasi berbasis web dan android yang berisi tentang informasi jaringan jalan di wilayah administrasi Kota Denpasar. SIJALAK merupakan sistem informasi yang berdasar pada data keruangan (spasial) dan mempresentasikan jaringan jalan di permukaan bumi. Teknologi informasi yang ada berupa perangkat yang membantu dalam menyimpan, menganalisa, dan mengelola data serta menyajikan informasi. Melalui SIJALAK diharapkan bahwa ada integrasi data infrastruktur yang menjadi kewenangan DPUPR Kota Denpasar khususnya di bidang jalan sehingga bisa menjadi sumber data yang valid bagi pengambil kebijakan serta bagi masyarakat umum.

4.4 SIDASI (Sistem Informasi Drainase dan Irigasi Kota Denpasar)

SIDASI (Sistem Informasi Drainase dan Irigasi) Denpasar adalah aplikasi berbasis web dan android yang berisi tentang informasi jaringan drainase dan irigasi di wilayah administrasi Kota Denpasar. SIDASI merupakan sistem informasi yang berdasar pada data keruangan (spasial) dan mempresentasikan jaringan drainase dan irigasi di permukaan bumi. Teknologi informasi yang ada berupa perangkat yang membantu dalam menyimpan, menganalisa, dan mengelola data serta menyajikan informasi. Melalui SIDASI diharapkan bahwa ada integrasi data infrastruktur yang menjadi kewenangan DPUPR Kota Denpasar khususnya di bidang drainase dan irigasi sehingga bisa menjadi sumber data yang valid bagi pengambil kebijakan serta bagi masyarakat umum.

BAB V

PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh Sasaran Strategis dan pencapaian target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan sebagaimana dimaksud mencerminkan telah diterapkannya aspek efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Namun demikian diperlukan perencanaan yang lebih matang dan *reasonable* sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lebih efisien dan efektif, diperlukan peningkatan disiplin, kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

Permasalahan-permasalahan teknis terkait dengan koordinasi dengan instansi terkait serta langkah-langkah koordinasi, edukasi dan persuasip kepada masyarakat/stakeholder perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya memperlancar pelaksanaan dan realisasi program dan kegiatan. Evaluasi yang lebih mendalam sangat diperlukan terhadap pemilihan penyedia barang dan jasa yang akan ditetapkan sebagai pemenang lelang khususnya untuk penawaran dibawah 80%, sehingga dapat dihindari terjadinya kegagalan penyelesaian pekerjaan.

Diharapkan adanya kerjasama dari semua pihak dalam upaya meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, sehingga pencapaian kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan diatas adalah :

1. Melakukan inventarisasi permasalahan, memformulasikan pemecahan masalah dan melakukan kajian peraturan dan perundangan dalam upaya menindaklanjuti permasalahan.
2. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas, efektifitas dan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Meningkatkan kompetensi, kapabilitas dan kapasitas SDM aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.
4. Meningkatkan kualitas dan efektifitas koordinasi, mediasi dan persuasi kepada masyarakat / stakeholder serta instansi terkait.
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar.

6. Meningkatkan efektifitas dan responsifitas pemilihan penyedia barang dan jasa melalui Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kota Denpasar.

Dengan capaian kinerja PK dan RKT DPUPR Kota Denpasar diharapkan akan dapat mendorong peningkatan layanan publik, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar serta dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dan *stake holder* untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN